INSPEKTORAT JENDERAL **KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**	**NOMOR SOP**	ITJ-OT.02.02-30
	TANGGAL PEMBUATAN	19 Februari 2026
	TANGGAL REVISI	19 Februari 2026
	TANGGAL EFEKTIF	19 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	**INSPEKTUR JENDERAL** **Hendro Pandowo**
	NAMA SOP :	**Pengusulan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Di Lingkungan Inspektorat Jenderal**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23); 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351); 7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).	1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian kenaikan gaji berkala; Menguasai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum; 2. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak; 3. Mendapat persetujuan/ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
-	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka berpotensi administrasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala bagi pegawai menjadi terhambat.	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kelompok Kerja yang Membidangi SDM	Inspektur Jenderal	Kelompok Kerja yang Membidangi Keuangan dan Pegawai yang bersangkutan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun daftar Nominatif Kenaikan Gaji Berkala pegawai	Mulai			Daftar Pegawai	2 hari	Daftar Nominatif KGB	Dibuat pada saat ada pegawai baru, Penyesuaian Ijazah dan Peninjauan Masa Kerja (PMK), Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
2	Membuat dan mengirimkan konsep Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala kepada Inspektur Jenderal				Daftar Nominatif KGB	1 hari	Konsep SK KGB	
3	Memeriksa konsep Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai. Jika setuju diserahkan kembali ke Kelompok Kerja yang Membidangi SDM, jika tidak setuju dikembalikan ke Kelompok Kerja yang Membidangi SDM untuk diperbaiki		T Y		Konsep SK KGB	2 hari	SK KGB	
4	Menerima dan mengadministrasikan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan menyerahkan ke Kelompok Kerja yang Membidangi Keuangan dan Pegawai yang bersangkutan				SK KGB	1 hari	Arsip SK KGB	
5	Distribusi Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangani untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pegawai yang bersangkutan			Selesai	SK KGB	1 hari	Kenaikan Gaji Berkala	Bagian/ Kelompok Kerja yang Membidangi Keuangan memproses lebih lanjut ke KPPN terkait pembayaran gaji